Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN KOORDINASI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

BIRO HUMAS, KEARSIPAN, & TATA USAHA PIMPINAN

LAPORAN KOORDINASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyelaras Akhir : Parulian George Andreas Silalahi
Reviewer : David Tinambunan
Editor : Syarifah Nur Aida
Tim Pendukung : Hibatul Wafi
Diaz Pradista Diandra
Kartika Hastuti
Ayu Hartanti
Sarono Santoso
Jennifer Olivia
Layout/Desain : Machfud Prasetyo
Arif Masroni

Diterbitkan oleh:
Biro Hubungan Masyarakat, Kerasipan, dan Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN 3
1.3 SASARAN 3
1.4 RUANG LINGKUP 3
1.5 KELUARAN 4
1.6 METODOLOGI 4
1.6.1 Pengumpulan Informasi dan Data 4
1.6.2 Pengelolaan Informasi dan Data 4
1.6.3 Pelayanan Permohonan Informasi dan Data 5
1.6.4 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu 6
1.6.5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPID 8
1.6.6 Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Sekretariat PPID dan PIC PPID 8
1.6.7 Partisipasi pada Kegiatan Bakohumas 9
1.6.8 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 11
2.1 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 11
2.2 PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KOORDINASI SEKRETARIAT PPID DAN PIC PPID 25
2.3 KUNJUNGAN TAMU 25
2.4 BADAN KOORDINASI HUMAS (BAKOHUMAS) 39
2.5 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 40
BAB III PEMBAHASAN 43
3.1 FAKTOR PENDUKUNG 43
3.2 FAKTOR PENGHAMBAT 44
BAB IV PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 11
Tabel 2.2. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 19
Tabel 2.3. Kunjungan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022 27
Tabel 2.4. Kunjungan Tamu Negara Asing Tahun 2022..... 38
Tabel 2.5. Kunjungan Tamu Akademisi/Universitas Tahun 2022..... 38
Tabel 2.6. Kunjungan Tamu Antar Lembaga Tahun 2022..... 39
Tabel 2.7. Pertemuan Bakohumas yang Dihadiri selama Tahun 2022 39
Tabel 2.8. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik selama Tahun 2022 41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Pemohon Informasi per Bulan Tahun 2022 12
Grafik 2.2. Mekanisme Permohonan Informasi per Bulan 2022 13
Grafik 2.3. Jenis Informasi Yang Diminta Tahun 2022..... 14
Grafik 2.4. Pelayanan Permohonan per Bulan Tahun 2022 15
Grafik 2.5. Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
Periode Januari-Juni Tahun 2022..... 16
Grafik 2.6. Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
Periode Juli-Desember Tahun 2022 17
Grafik 2.6. Rekapitulasi Kunjungan Tamu selama Tahun 2022 26
Grafik 2.7. Kunjungan Tamu berdasarkan Jumlah per Bulan Tahun 2022 26
Grafik 2.8. Kunjungan Tamu DPRD berdasarkan UKE II Penerima Tahun 2022 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Inspektur Utama selaku Plh. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 18

Gambar 2. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik "Informatif"..... 18

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu bagian penting dalam reformasi birokrasi, dan terwujudnya masyarakat informasi. Adanya keterbukaan Informasi Publik menjamin Hak untuk Tahu masyarakat, dan sekalius bentuk kontrol terhadap Badan Publik dari Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelayanan Informasi Publik telah dijamin dan diwujudkan Pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pengesahan UU KIP merupakan bentuk penegasan bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Keberadaan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 semakin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan *good governance* yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 sekaligus memenuhi hak untuk tahu masyarakat.

Secara garis besar UU KIP yang terdiri dari 64 pasal ini mencakup 4 (empat) hal utama, yaitu: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas; serta (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Sebagaimana peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, setiap Badan Publik wajib memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tanggung jawab sebagai penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Hal ini menunjukkan Kementerian PPN/ Bappenas memiliki peran sentral dalam proses penyusunan rencana dan anggaran pembangunan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, hingga evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan.

Oleh karena itu, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang tidak termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan, sudah seharusnya disosialisasikan kepada publik sebagai wujud transparansi informasi. Kementerian PPN/Bappenas harus membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi yang menjadi hak masyarakat luas. Kementerian PPN/Bappenas juga harus siap melayani dengan baik setiap permintaan informasi dari publik. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka UU KIP mengatur sanksi pidananya.

Sebagai kelanjutan dari Kegiatan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan tahun 2015, serta telah disusunnya SK Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Data (FKPPID) seluruh Kementerian/Lembaga, maka menjadi sangat penting untuk dijadikan kegiatan tersendiri bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik yang merupakan amanat UU KIP, yang kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian PPN/Bappenas dan masuk dalam salah satu tupoksi Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas hingga di tahun 2010, merasa perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kementerian PPN/Bappenas, antara lain dengan melakukan penyusunan Daftar Informai Publik (DIP), peningkatan koordinasi dengan *Person In Charge* (PIC) PPID di Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan informasi publik, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembangunan aplikasi PPID Kementerian PPN/Bappenas berbasis *Mobile*.

Selain itu, masih adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 mengharuskan Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyesuaian dan antisipasi sarana dan fasilitasi layanan kunjungan dan permohonan informasi secara daring. Saluran komunikasi menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk

mewujudkan komunikasi antara pejabat pengelola dengan pemohon informasi dan kunjungan Kementerian PPN/Bappenas.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengendalikan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam koridor yang sistematis dan efektif, serta mendorong implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.

1.3 SASARAN

Sasaran kegiatan, yaitu terkendalinya seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang sistematis dan efektif. Indikator yang menunjukkan keberhasilkan kegiatan ini, antara lain:

a. Bulan efektif pengelolaan informasi dan dokumentasi Kementerian PPN/ Bappenas, yaitu 12 (dua belas) bulan.

b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu dengan predikat baik.

1.4 RUANG LINGKUP

Kegiatan ini memiliki ruang lingkup, yaitu:

a. Pengumpulan informasi dan data.
b. Pengelolaan informasi dan data.
c. Pelayanan pemohon informasi dan data.
d. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu.
e. Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPID.
f. Peningkatan Koordinasi dengan PIC PPID.
g. Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Informasi.
h. Partisipasi pada Kegiatan Bakohumas.
i. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik

1.5 KELUARAN

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

a. Terselenggaranya pengumpulan informasi dan data yang baik.
b. Terciptanya pengelolaan dan pelayanan informasi dan data yang baik.
c. Tersusunnya standar pelayanan informasi publik yang baik.
d. Terjalinnya koordinasi yang efektif dengan pihak internal dan eksternal.
e. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang baik.
f. Terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik.

1.6 METODOLOGI

1.6.1 Pengumpulan Informasi dan Data

Informasi dan data yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, yang dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis. Pada tahun 2022, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan melakukan pengumpulan informasi dan data dari UKE I dan II sebagai salah satu tahap dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan dalam rangka memenuhi permohonan informasi yang diajukan masyarakat.

1.6.2 Pengelolaan Informasi dan Data

Informasi dan data yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan UU KIP, meliputi:

a. **Informasi dan data yang wajib disediakan secara berkala**. Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan informasi dan data terkait Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Kerja, RPJPN, RPJMN, dan RKP.
b. **Informasi dan data yang wajib diumumkan secara serta merta**. Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki informasi yang dimaksud.

c. **Informasi dan data yang wajib tersedia setiap saat**. Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan informasi dan data terkait Daftar Informasi Publik (DIP), peraturan perundang-undangan, prosedur perizinan, keputusan, kebijakan, DIPA, RKA K/L, serta hasil penelitian dan kajian.

d. **Informasi dan data yang dikecualikan**. Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas telah menyediakan menyediakan daftar informasi dan data yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik ini dibuktikan melalui berita acara uji konsekuensi yang dilakukan PPID Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

1.6.3 Pelayanan Permohonan Informasi dan Data

Untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan keberatan terkait pelayanan informasi Kementerian PPN/Bappenas, pemohon dapat mengajukan melalui salah satu dari cara-cara berikut:

a. Datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik dan mengisi formulir permohonan informasi atau formulir keberatan yang disediakan. Adapun Ruang Pelayanan Informasi Publik ada di alamat berikut:

   Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
   Kementerian PPN/Bappenas
   Gedung Wisma Bakrie 2, Lantai 2
   Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi
   Jakarta Selatan 12920
   Telp: (021) 50927443 / WhatsApp: 081211002143

   Sebagai persyaratan untuk pemohon informasi yang datang langsung, wajib menunjukkan bukti identitas KTP/Surat Keterangan Kependudukan bagi perorangan, atau Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Publik.

b. Mengirimkan formulir permohonan informasi atau pengajuan keberatan beserta persyaratnnya melalui pos ke alamat Sekretariat PPID.

c. Membuat akun dan mengisi formulir secara daring di Website PPID (ppid.bappenas.go.id)

d. Mengirim pertanyaan melalui e-mail (ppid@bappenas.go.id) dan WhatsApp di nomor 081211002143.

e. Menyampaikan permohonan informasi melalui telepon.

Kemudian, Unit Pelayanan Informasi akan menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus (informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat, atau belum termuat dalam DIP) maka Formulir Permintaan Informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik.

Tim Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan PIC PPID di UKE II terkait untuk memproses permintaan informasi. Proses ini melalui disposisi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi. Apabila informasi sudah terkumpul, Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon.

Apabila pemohon informasi ingin mengajukan keberatan atas pelayanan informasi, akan diberikan formulir pengajuan keberatan. Setelah menerima dan pengisian formulir keberatan, Tim Sekretariat akan meneruskan pengajuan ke PPID untuk ditindaklanjut ke atasan PPID. Jika pengadu masih belum puas, maka dapat mengajukan penyeleseian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.

Biaya pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/Bappenas, sehingga pengguna informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi/ bahan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi.

Produk pelayanan yang diberikan adalah berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk *hardcopy* (buku, majalah, brosur, dan hasil cetakan) sesuai dengan ketersediaan, dan *softcopy* (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Adapun sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang terdapat di Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, adalah: (1) Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman; (2) Ruang tunggu; (3) Produk pelayanan; (4) Komputer; (5) Meja dan kursi; (6) Rak informasi; (7) Telepon; (8) Printer; dan (9) Televisi.

1.6.4 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu

a. **Kunjungan Tamu Dalam Negeri** (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta)

1. Tamu mengirimkan surat permohonan kunjungan/konsultasi kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk berkunjung ke Kementerian PPN/Bappenas melalui surat, email kunjungantamu@bappenas.go.id maupun Website PPID (ppid.bappenas.go.id) dan menghubungi saluran komunikasi resmi kunjungan tamu WhatsApp Kunjungan Tamu di 081211002142;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas akan mendisposisikan kepada Kedeputian yang terkait (untuk menyiapkan bahan paparan) sementara Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan memberikan dukungan;
3. Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan akan berkoordinasi dengan kedeputian terkait dalam hal dukungan, seperti jadwal pelaksanaan, penyediaan ruangan, jamuan, cinderamata, dan lain-lain terkait kunjungan tersebut;
4. Pada saat yang sama, Biro Humas akan berkoordinasi dengan pihak yang akan mengadakan kunjungan.

b. **Kunjungan Tamu Luar Negeri** (Duta Besar, Lembaga Donor, dan sebagainya)

1. Perwakilan negara/organisasi yang bersangkutan mengirimkan surat permohonan untuk berkunjung ke Kementerian PPN/Bappenas;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas mendisposisikan penugasan penerimaan kepada kedeputian terkait, tembusan Biro Humas dan TU Pimpinan;
3. Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan berkoordinasi dengan kedeputian terkait dalam hal dukungan, seperti jadwal pelaksanaan, penyediaan ruangan, jamuan, cinderamata, dan lain-lain terkait kunjungan;
4. Pada saat yang sama, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan akan berkoordinasi dengan pihak yang akan mengadakan kunjungan. Apabila diperlukan, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

1.6.5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPID

Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan guna menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2022, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan melakukan rekapitulasi permohonan informasi publik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemohon informasi tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, mekanisme yang dominan untuk memperoleh informasi adalah melalui jalur daring via website PPID.

1.6.6 Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Sekretariat PPID dan PIC PPID

Selama tahun 2022, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan merasa perlu meningkatkan koordinasi dan kompetensi bagi Sekretariat PPID dan Penanggung Jawab/*Person In Charge* (PIC) PPID Kementerian PPN/ Bappenas, yang merupakan perwakilan di setiap Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II.

Peningkatan kompetensi bagi Sekretariat PPID dilaksanakan dengan melakukan audiensi ke instansi atau pemerintah daerah yang telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dengan baik dan mendapatkan predikat Informatif pada Monev KIP. Dalam audiensi tersebut, Sekretariat PPID diharapkan dapat mempelajari berbagai praktik baik (best practices) yang dilaksanakan oleh instansi lain sehingga dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan pelayanan informasi di Kementerian PPN/Bappenas.

Audiensi dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan PPID instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan audiensi. Pemilihan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti peringkat dalam Monev KIP, inovasi pelayanan informasi yang telah dilakukan, dan lain-lain. Setelah instansi tujuan audiensi ditentukan, PPID Kementerian PPN/Bappenas mengirimkan surat permohonan audiensi kepada PPID instansi tujuan untuk dilakukan penjadwalan kunjungan audiensi. Setelah permohonan audiensi diterima, PPID menugaskan Sekretariat PPID untuk melakukan kunjungan ke instansi dimaksud dan melakukan audiensi guna menggali pengelolaan dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PPID instansi tujuan.

Peningkatan koordinasi dengan PIC PPID untuk tahun anggaran 2022, diwujudkan dengan memastikan setiap UKE I dan II di Kementerian PPN/Bappenas telah menunjuk salah satu dari pegawainya sebagai PIC PPID. Mereka yang ditunjuk akan menjadi penghubung antara Sekretariat PPID dan Unit Kerja dalam melakukan koordinasi terkait pengumpulan, pengelolaan, dan pelayanan informasi.

Penunjukan PIC PPID diawali dengan pengiriman nota dinas oleh Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan ke seluruh Unit Kerja yang belum menunjuk PIC PPID. Unit Kerja kemudian menunjuk salah satu pegawainya dan memberitahukan nama dan kontak yang bersangkutan kepada PPID. Sekretariat PPID kemudian mencatat nama-nama PIC PPID yang telah ditunjuk dari seluruh UKE I dan II di Kementerian PPN/Bappenas.

1.6.7 Partisipasi pada Kegiatan Bakohumas

a. Bakohumas mengirimkan surat undangan kegiatan Bakohumas, yang diselenggarakan oleh Bakohumas atau K/L pusat dan/atau daerah, ditujukan kepada Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
b. Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan kemudian mendisposisikan surat undangan kepada Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik.
c. Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan, mengajukan permohonan SPPD apabila kegiatan Bakohumas berlangsung di luar kota.
d. Kepala Bagian Humas menugaskan Staf Biro Humas yang menghadiri kegiatan Bakohumas menyiapkan laporan kegiatan.

1.6.8 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Sejak Januari 2021, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan mendapatkan amanat dari Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama untuk mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) dengan menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola laporan, aduan, serta aspirasi yang diajukan oleh

masyarakat melalui berbagai kanal pelaporan seperti website lapor.go.id, aplikasi *mobile* LAPOR!, SMS ke nomor 1708, dan Twitter @lapor1708.

Semua aduan yang masuk dapat dilihat melalui akun admin LAPOR! Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh Sekretariat PPID. Jika ada laporan yang masuk, Sekretariat PPID akan berkoordinasi dengan PPID untuk melakukan penilaian apakah laporan tersebut merupakan kewenangan Kementerian PPN Bappenas. Jika ya, maka laporan akan diverifikasi. Jika laporan bukan merupakan wewenang Kementerian PPN/Bappenas, maka Sekretariat PPID akan mengembalikan laporan kepada sistem dan menyarankan untuk diteruskan ke instansi yang dianggap berwenang.

Laporan yang telah diverifikasi kemudian disampaikan kepada Unit kerja yang berkaitan dengan isi laporan untuk ditindaklanjuti. Jika sudah ada, tindak lanjut maupun tanggapan dari Unit Kerja kemudian disampaikan kepada pelapor melalui aplikasi LAPOR! Pelapor dapat menyelesaikan laporan jika sudah puas dengan tanggapan yang disampaikan. Namun jika belum puas, pelapor dapat memberikan tanggapan kembali. Laporan juga akan diselesaikan otomatis oleh sistem jika tidak ada tanggapan balik dari pelapor selama 10 hari setelah laporan ditanggapi.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan informasi publik selama tahun 2022 telah dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember 2021. Sebagai rincian, berikut tabel pelaksanaan pelayanan informasi publik selama kurun waktu tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelayanan Informasi Publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kunjungan Tamu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Badan Koordinasi Humas			✓							✓		
4.	Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hingga Desember 2022, Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas telah melayani sebanyak 90 pemohon informasi publik melalui Website PPID, saluran komunikasi WhatsApp, email, maupun surat resmi, dengan rincian 82 pemohon dari individu dan 8 pemohon dari Badan Hukum.

Grafik 2.1. Jumlah Pemohon Informasi per Bulan Tahun 2022

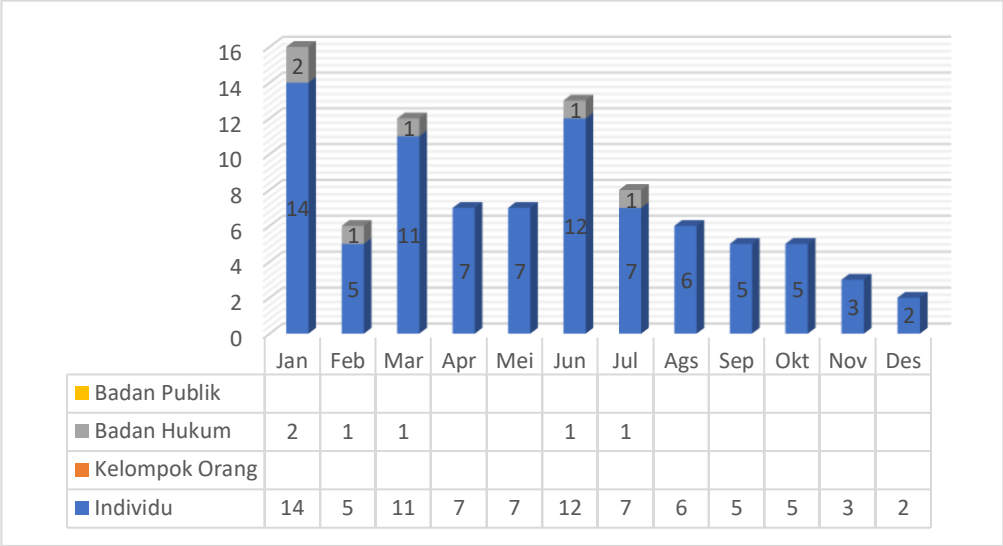

Mekanisme permohonan informasi secara elektronik, baik melalui website, e-mail, dan saluran komunikasi, masih menjadi mekanisme yang paling banyak digunakan oleh pemohon informasi. Masih adanya Pandemi Covid-19 dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan mekanisme permohonan secara elektronik sebagai pilihan terbaik bagi masyarakat. Tercatat selama tahun 2022 terdapat 78 permohonan dilakukan melalui website, 9 permohonan melalui saluran komunikasi Whatsapp, dan 3 permohonan dilakukan melalui email.

Sebagai upaya memaksimalkan pelayanan informasi, PPID melakukan peningkatan dalam sarana mekanisme permohonan informasi secara elektronik, antara lain dengan melakukan Pembangunan Aplikasi Mobile PPID berbasis Android. Saat in Aplikasi Mobile PPID Kementerian PPN/Bappenas dapat diunduh di Toko Aplikasi berbasis Android Google Play Store pada tautan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ppid.bappenas.id. Selain fitur pengajuan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan pengajuan kunjungan, beberapa fitur yang dimiliki oleh Aplikasi Mobile PPID Bappenas antara lain:

- Integrasi Aplikasi dengan Website PPID, sehingga 1 akun dapat digunakan secara multi platform. Pengguna yang telah memiliki akun di Website PPID tidak perlu membuat akun baru untuk menikmati layanan di Aplikasi Mobile PPID.

- Tautan ke berbagai layanan Digital Kementerian PPN/Bappenas seperti Website Resmi Kementerian PPN/Bappenas (bappenas.go.id), Perpustakaan Online Kementerrian PPN/Bappenas (perpustakaan.bappenas.go.id), Whistle Blower System Kementerian PPN/Bappenas (irtama.bappenas.go.id/wbs), dan Lapor.go.id.

Selain itu, penggunaan Whatsapp PPID menjadi sarana mitigasi selama Pandemi Covid-19, agar pemohon informasi tetap berjalan efektif dan efisien. Saluran komunikasi Whatssapp PPID dengan Nomor 081211002143 diharapkan dapat menjembatani pertanyaan secara langsung dari pemohon, sekaligus menjembatani pemohon informasi kepada PIC PPID di unit kerja terkait. Saluran komunikasi Whatsapp PPID juga dimanfaatkan sebagai upaya pengendalian adanya pemohon informasi yang tidak menyertakan kelengkapan administrasi sesuai SOP permohonan informasi publik.

Grafik 2.2. Mekanisme Permohonan Informasi per Bulan 2022

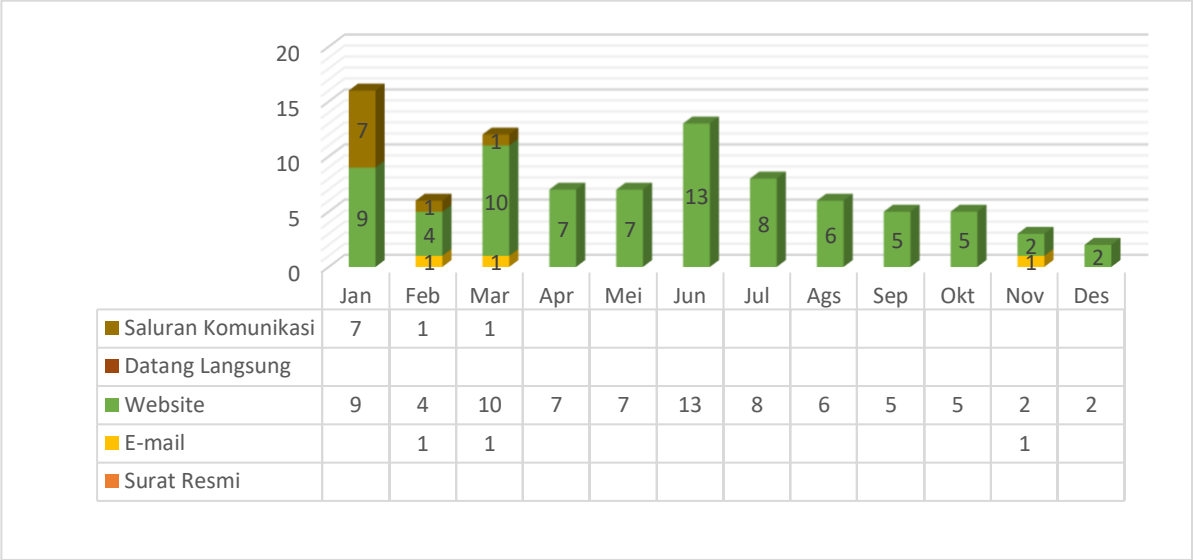

Informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon terdiri dari berbagai macam jenis informasi. Jenis informasi yang paling banyak diminta adalah terkait pemohonan magang di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu sebanyak 8 kali. Jenis informasi lainnya yang banyak diminta adalah terkait kepegawaian, sebanyak 6 permohonan, kemudian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebanyak 5 permohonan, Ibu Kota Negara sebanyak 5 permohonan, Dokumen Perencanaan dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masing-masing sebanyak 4

permohonan. Selain itu, pemohon juga meminta informasi terkait lowongan pekerjaan, Pendanaan Pembangunan, Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan berbagai isu lainnya.

Grafik 2.3. Jenis Informasi Yang Diminta Tahun 2022

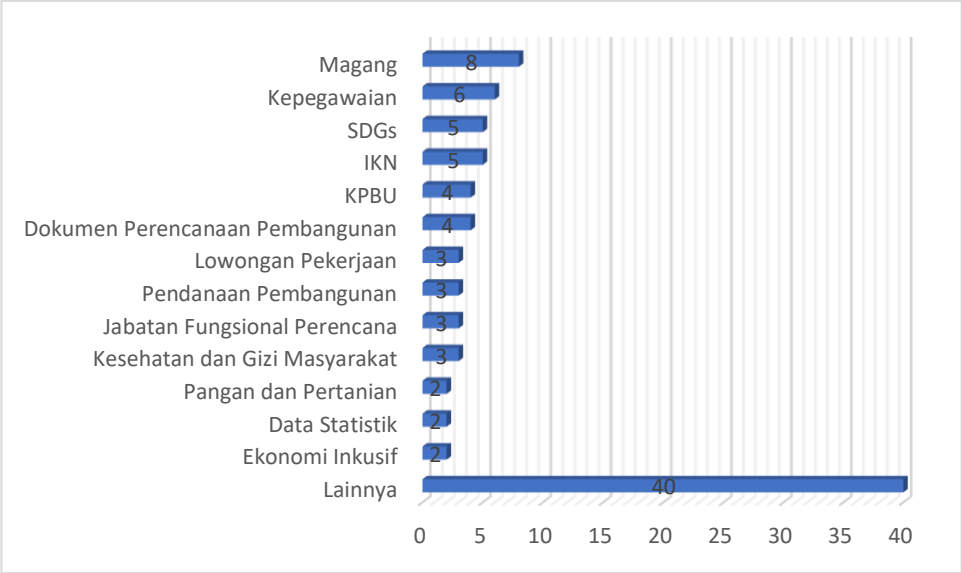

Data yang diproses dan diberikan kepada pemohon selama kurun waktu 2022 dikategorikan menjadi beberapa kriteria. Pertama, informasi yang diberikan keseluruhan, dengan jumlah 58 informasi/dokumentasi. Kedua, diberikan sebagian dengan jumlah 14 informasi/dokumentasi. Informasi/dokumentasi yang hanya diberikan sebagian karena informasi dan data yang dimiliki memang hanya sebagian, selebihnya tidak ada dan/atau berada di badan publik lain. Ketiga, tidak dapat diberikan/ditolak karena tidak dikuasai oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan jumlah 15 informasi/dokumentasi. Keempat, tidak dapat diberikan/ditolak karena termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan sebanyak 1 permohonan. Permohonan informasi ditolak mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permohonan informasi ditolak/tidak diberikan tidak membuat capaian pemenuhan permohonan informasi dan dokumentasi publik menjadi negatif. Secara peraturan dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik memiliki dasar hukum yang mengatur jenis dokumentasi yang boleh dan tidak boleh diberikan. Sebagai “Badan Publik”, Kementerian PPN/Bappenas tentunya memiliki dasar pertimbangan yang cukup kuat dalam memberikan informasi, di antaranya apakah informasi yang

dimohonkan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), apakah informasi yang dimohonkan merupakan wewenang atau dikuasai oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan apakah informasi yang dimohonkan termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Grafik 2.4. Pelayanan Permohonan per Bulan Tahun 2022

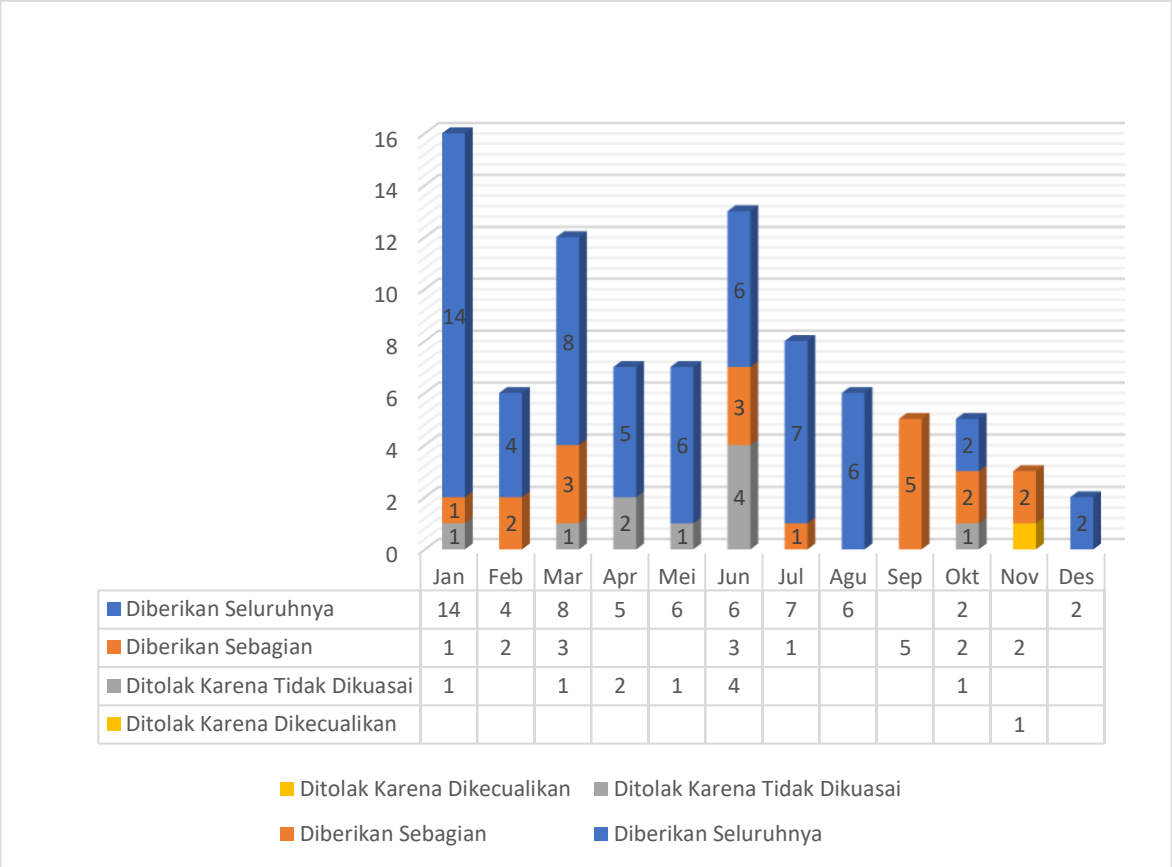

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Diberikan Seluruhnya	14	4	8	5	6	6	7	6		2		2
Diberikan Sebagian	1	2	3			3	1		5	2	2	
Ditolak Karena Tidak Dikuasai	1		1	2	1	4				1		
Ditolak Karena Dikecualikan											1	

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan layanan informasi publik, Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas membuat Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi di Kementerian PPN/Bappenas. Survei dilaksanakan dengan mengacu pada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan responden dari masyarakat yang telah menikmati layanan dari Kementerian PPN/Bappenas berupa layanan infomasi dan kunjungan tamu.

Survei dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu dalam periode Januari-Juni 2022 dan Juli-Desember 2022. Pada periode Januari-Juni 2022, sebanyak 77 responden

mengisi kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Website PPID setelah masyarakat menikmati layanan informasi. Dari survei tersebut, pada periode Semester 1 Tahun 2022 diperoleh Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik sebesar 85,47 persen. Berdasarkan PermenPANRB No. 14/2017, nilai tesebut berada dalam kategori Baik (76,61-88,30).

Grafik 2.5. Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
Periode Januari-Juni Tahun 2022

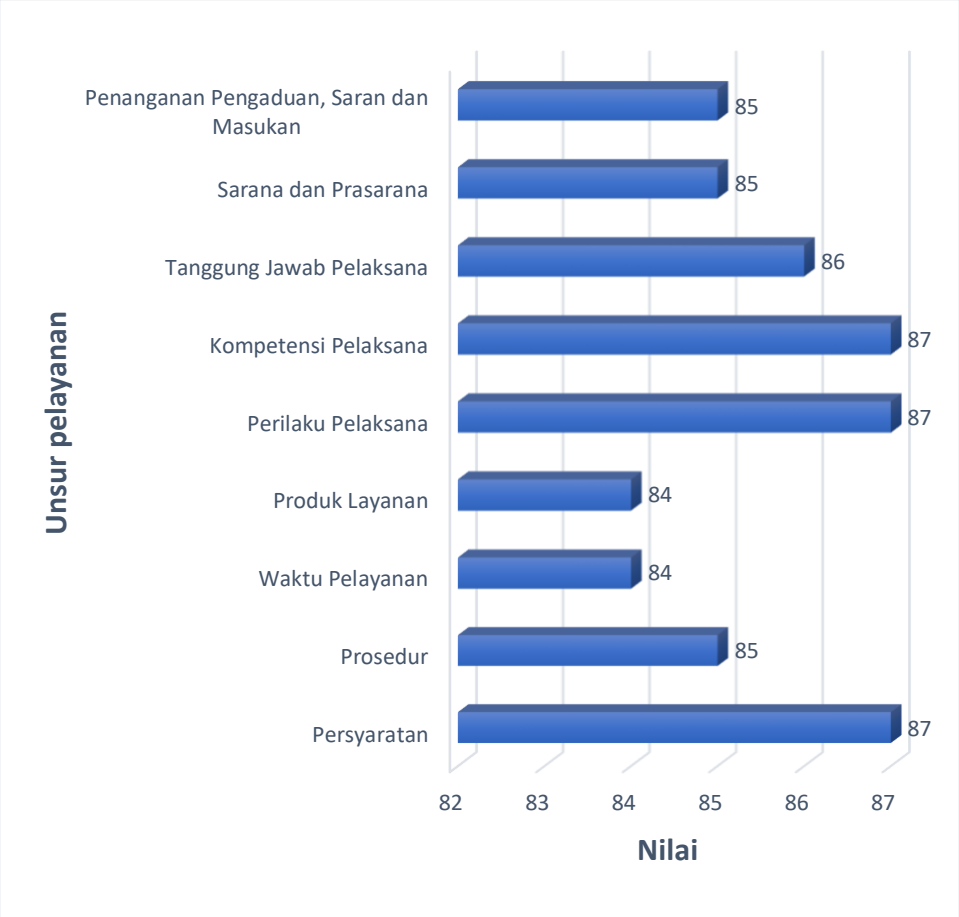

Pada periode Juli-Desember Tahun 2022, terdapat 41 responden mengisi kuesioner. Pada periode ini, didapat Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik sebesar 80,03 persen. Berdasarkan PermenPANRB No. 14/2017, nilai tesebut berada dalam kategori Baik (76,61-88,30).

Grafik 2.6. Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik
Periode Juli-Desember Tahun 2022

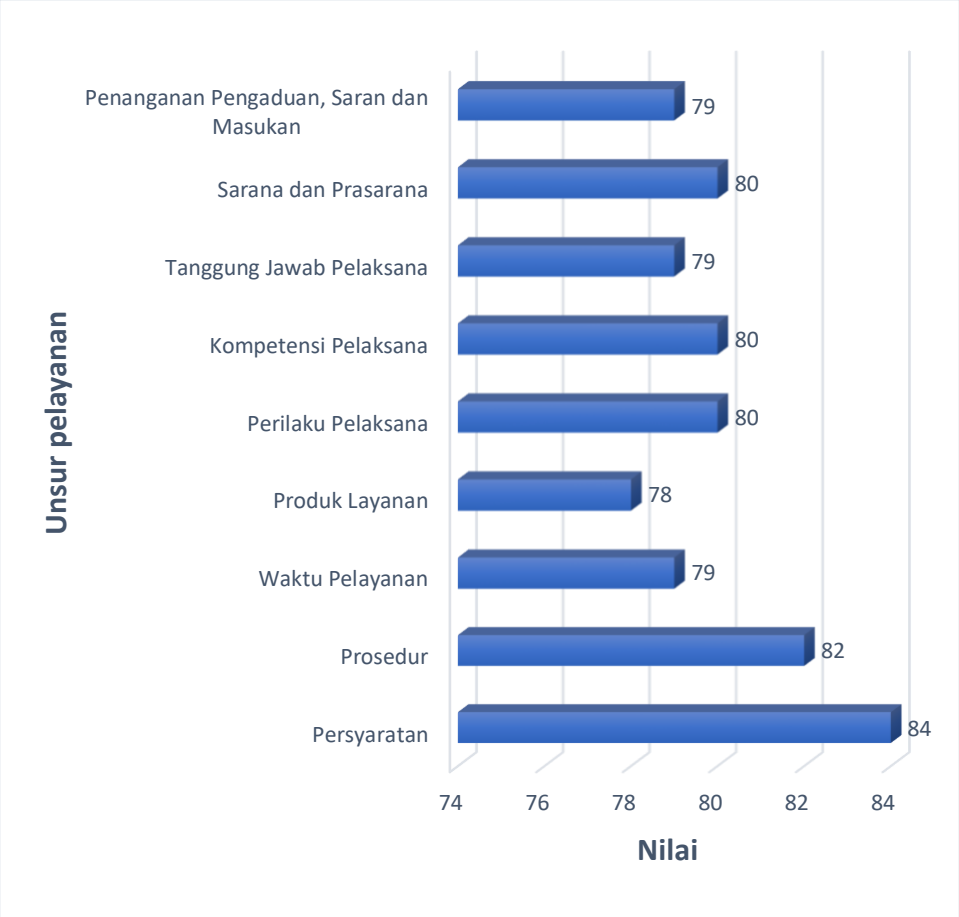

Pada 2022 Kementerian PPN/Bappenas kembali ikut serta dalam *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam memastikan Badan Publik melaksanakan amanat UU KIP. Hasil dari Monev KIP 2022 yang diumumkan pada 14 Desember 2022, Kementerian PPN/Bappenas berhasil mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 99,45. Nilai tersebut juga merupakan peringkat kedua dari kategori Kementerian. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil Monev KIP tahun 2021 yang mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 90,13. Capaian ini patut disyukuri dan harus dijadikan pendorong untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan informasi publik.

Gambar 1. Inspektur Utama selaku Plh. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 2. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik "Informatif"

Tabel 2.2. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

No	Nama Pemohon	Tanggal	Informasi Yang Diminta	Tujuan	Waktu Proses
1.	Elsa Nurhasanah	3 Januari 2022	Informasi terkait Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
2.	Triani Safira	6 Januari 2022	Program kerja sama CPAP (Country Program Action Plan) Tahun 2016-2020	Penyusunan Tugas Akhir	5 (lima) hari oleh Direktorat KPAPO
3.	Annisa Nur Amalia	11 Januari 2022	Dokumen MoU kerjasama Indonesia-Australia terkait program PRISMA	Penyusunan Tugas Akhir	3 (tiga) hari oleh Direktorat Pangan dan Pertanian
4.	Annisa Nur Amalia	13 Januari 2022	Informasi terkait Wawancara dengan Pejabat Bappenas terkait isu Pangan dan Pertanian	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
5.	Arinova Sindigita Prasana	24 Januari 2022	Informasi terkait Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
6.	Thea Khalifa	25 Januari 2022	Daftar proyek KPBU yang pada saat ini sedang dalam melalui (i) konsultasi publik dan (ii) market sounding	Keperluan Usaha Law Firm	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
7.	Inten Laras Satiti	25 Januari 2022	Informasi terkait Penelitian di Bappenas untuk penyusunan Tesis	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
8.	Raharjo	3 Januari 2022	Informasi terkait Penilaian Angka Kredit JFP di Kejaksaan Negeri Kulon Progo	Informasi terkait Kedinasan	2 (dua) hari oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
9.	Agung Cahyono	3 Januari 2022	Informasi Lowongan Pekerjaan	Lamaran Pekerjaan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
10.	Desi Amalia	5 Januari 2022	Informasi Lowongan Pekerjaan	Lamaran Pekerjaan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
11.	Kiki Dwi Rahmawati	10 Januari 2022	Informasi kontak bagian penggadaan Barang dan Jasa di Kementerian PPN/Bappenas	Keperluan Usaha	1 (satu) hari oleh Biro Umum
12.	Monica Dwiyanti	13 Januari 2022	Dokumen Repelita sejak Tahun 1980	Penyusunan Tugas Akhir	2 (dua) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
13.	Fidryaningsih Fiona	27 Januari 2022	Contact Person Sekretariat Sesmen/Sestama Bappenas	Pengiriman Undangan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
14.	Annisa Nur Amalia	27 Januari 2022	MoU mengenai AIP-Rural, juga dokumen pendukung yang berisikan background program kerjasama AIP-Rural, dan juga PRISMA	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Direktorat Pangan dan Pertanian
15.	Ilyasin Aditya Rahman	28 Januari 2022	Permohonan Wawancara ke Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
16.	Erda Traveler	31 Januari 2022	Info Bahan FKP Rancangan RKP 2023	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
17.	Abu Tholib	10 Februari 2022	DPP SBSN 2022	Keperluan Usaha	7 (tujuh) hari oleh Direktorat Perencanaan

					Pendanaan Pembangunan
18.	Idrina Nur Khairunnisa	16 Februari 2022	Informasi terkait Partisipasi Perempuan bagi SDGs	Penyusunan Tugas Akhir	3 (tiga) hari oleh Sekretariat SDGs
19.	Betty Wahyu Nilla Sari	17 Februari 2022	Contact person pembinaan Perencana Ahli Muda dan diklat dasar untuk Perencana Ahli Muda	Informasi terkait Kedinasan	1 (satu) hari oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
20.	Joko Wibisono	22 Februari 2022	Peraturan terkait Pembangunan Proyek Nasional dan Penempatan ASN	Diseminasi Informasi	3 (tiga) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
21.	Muhammad Hidayat S	25 Februari 2022	Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN yang disampaikan oleh Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas kepada KPK pada tahun 2020 dan atau 2021.	Pengawasan Masyarakat	3 (tiga) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
22.	Alya Azzahra	28 Februari 2022	Indeks Kota Berkelanjutan	Penyusunan Tugas Akhir	2 (dua) hari oleh Direktorat Pembangunan Daerah
23.	Vera Karlina	1 Maret 2022	Data Infrastruktur Pada provinsi Aceh	Keperluan Penyusunan Kebijakan	5 (lima) hari oleh Direktorat Regional 1 dan P3IPN
24.	Reza Rahmaditio	4 Maret 2022	Dokumen Kajian Pemindahan IKN Tahun 2019	Diseminasi Informasi	10 (sepuluh) hari oleh Direktorat Pembangunan Daerah
25.	Muhammad Hidayat S	4 Maret 2022	Profil dan Biodata Menteri dan seluruh pejabat eselon 1, 2, 3 dan pejabat non ASN setara eselon 1,2,3 Kementerian PPN/Bappenas RI	Pengawasan Masyarakat	17 (tujuh belas) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
26.	Fandy Hidayat Nugraha	4 Maret 2022	Data estimasi biaya pemindahan dan pembangunan Ibukota Negara Baru	Penyusunan Tugas Akhir	10 (sepuluh) hari oleh Direktorat Pembangunan Daerah
27.	Yondri Kapitan	10 Maret 2022	pedoman penyusunan RAD Pangan-Gizi dan RAN PG	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Direktorat Kesehatan Gizi Masyarakat
28.	Tosuhon Simanungkalit	10 Maret 2022	Masterplan IKN	Penyusunan Kajian	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
29.	Egen Napitupulu	11 Maret 2022	Masterplan IKN	Penyusunan Kajian	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
30.	Diana Aryanti	14 Maret 2022	Dokumen Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation	Penyusunan Kajian	4 (empat) hari oleh Deputi Ekonomi
31.	M. Hadi Wijaya	19 Maret 2022	Masterplan IKN	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
32.	La Ode Muhammad Rauda Agus	22 Maret 2022	Dokumen APBD Kab. Buton Selatan TA 2022	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
33.	Aidatu Rosyida	23 Maret 2022	Laporan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan-6 (SDG 6) tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam lima tahun terakhir.	Penyusunan Kajian	3 (tiga) hari oleh Sekretariat SDGs
34.	Adinda Febriyanti	25 Maret 2022	Informasi Lowongan Pekerjaan	Lamaran Pekerjaan	1 (satu) hari oleh Biro Humas,

					Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
35.	Yoga Pangestu	5 April 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
36.	Syifa Ul-ummah Ramadhani	8 April 2022	Informasi terkait Kerjasama Indonesia dengan UNODC	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
37.	Alya Zafira	11 April 2022	Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
38.	Sintami Mandey	14 April 2022	Penetapan AK untuk PNS formasi Jabatan Fungsional Perencana	Informasi terkait Kedinasan	1 (satu) hari oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
39.	NURFADHILAH ICHDAR	18 April 2022	CATATAN TEKNIS INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF	Penyusunan Tesis	4 (empat) hari oleh Deputi Ekonomi
40.	Annisa Syifa Ramadhanti	21 April 2022	Permohonan Wawancara dengan Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
41.	Dedi Suartika	22 April 2022	Keputusan sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor Kep.70/SES/HK/09/2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Biro Hukum
42.	Yola Argatha Manik	9 Mei 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
43.	Idrina Nur Khairunnisa	13 Mei 2022	Apakah pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan pemerintah telah sesuai dengan poin-poin yang ada dalam Women's Empowerment Principles (WEPs)?	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Direktorat KPAPO
44.	zakiyah khairunnisa	17 Mei 2022	Dokumen yang relevan terhadap kegiatan National Capital Integrated Coastal Development	Penyusunan Tugas Akhir	5 (lima) hari oleh Direktorat Pengairan dan Irigasi
45.	Marini Septiani	18 Mei 2022	Informasi Alamat Email Dit LH dan Dit PIKEI	Informasi terkait Kedinasan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
46.	Muhammad Abdul Jabar	18 Mei 2022	Informasi terkait Proyek Startegis Nasional yang dilaksanakan dengan kerjasama Pemerintah dan Swasta	Penyusunan Kajian	5 (lima) hari oleh Direktorat TRPB dan P3IPN
47.	Muchtar Runggang	19 Mei 2022	1. Apakah benar Program bedah rumah Layak Huni ini ada di Indonesi dan terdaftar/ terpantau di Bappenas. 2. Apa nama Lembaga yang mengelola di Tingkat Nasional. 3. Dimana alamat, Nomor Kontak dan Email kantor sekretariat Lembaga Pengelola program ini di Jakarta. 4. Apakah program ini sudah berjalan dan mohon info	Diseminasi Informasi	2 (dua) hari oleh Direktorat Perumahan dan Permukiman

			daerah mana yang sudah berjalan.		
48.	Dyah Ayu Ningrum	25 Mei 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
49.	Fahmi Prayoga	2 Juni 2022	Permohonan untuk softfile Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Bappenas tahun 2014-2019	Penyusunan Kajian	3 (tiga) hari oleh Biro Renortala
50.	Anisa Eka Putri	9 Juni 2022	Data jumlah anggota kepolisian daerah (POLDA) di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2002 hingga 2021	Penyusunan Kajian	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
51.	Fachryani Putri	13 Juni 2022	Informasi Lowongan Pekerjaan	Lamaran Pekerjaan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
52.	Emerich Angel	13 Juni 2022	Mencari Data (Implementasi, kepentingan, dan Dampak) Kerjasama Indonesia Finlandia dalam bidang Kehutanan dan Sumberdaya Alam Periode 2017-2021	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Direktorat Kehutanan
53.	Azzahra Salsabila Puspitasari	15 Juni 2022	dokumen evaluasi dana dekonsentrasi bappenas di Jawa Tengah tahun anggaran 2021	Penyusunan Tugas Akhir	3 (tiga) hari oleh Biro Renortala
54.	Emerich Angel	13 Juni 2022	Intervensi dan implementasi dari Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia periode 2017-2021 yang berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan.	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
55.	Muhammad Aries Ramadhan	16 Juni 2022	Prevalensi Balita Stunting di Indonesia 5 Tahun Kebelakang	Penyusunan Kajian	5 (lima) hari oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
56.	Rima Harahap	17 Juni 2022	Informasi Kontak Deputi KSDA	Informasi terkait Kedinasan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
57.	Emerich Angel	20 Juni 2022	Implementasi Pembangunan Indonesia(SDGs) dalam periode 2017-2021	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
58.	Tri Sulastyo	20 Juni 2022	RKP Tahun 2023	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
59.	PT Alpha Beta Engineering	20 Juni 2022	dataset Menara BTS (Base Transceiver Station)	Keperluan Usaha	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
60.	Varian Syamrizal	24 Juni 2022	Masterplan [satu peta NKRI bukan bukunya] untuk public private partnership (PPP) infrasturcture projects plan yang terupdate	Keperluan Usaha	3 (tiga) hari oleh Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
61.	Wilda Kusuma	30 Juni 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
62.	Mutiara Chairunnisa	4 Juli 2022	Data perencanaan pembangunan maritim Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia dan juga data kerjasama internasional yang Indonesia lakukan dengan negara lain	Penyusunan Tugas Akhir	3 (tiga) hari oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan

			mengenai Poros Maritim tersebut.		
63.	Varian Syamrizal	5 Juli 2022	Data grafik/matrix serapan dana secara aktual berdasarkan berdasarkan buku Public-private partnership infrstructure projects plan in Indonesia 2021	Keperluan Usaha	3 (tiga) hari oleh Direktorat PPP
64.	Atalla Wahyudi	15 Juli 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
65.	Anggrius Vigilianus Priski Radho Radho	15 Juli 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
66.	Ade Handayani	19 Juli 2022	Data kontak (email/hp/telpon) Bappeda seluruh provinsi untuk mendukung kebutuhan evaluasi dampak covid-19 terhadap ketimpangan (oleh direktorat kependudukan dan jaminan sosial)	Keperluan Penyusunan Kebijakan	2 (dua) hari oleh Direktorat Pembangunan Daerah
67.	Bayu Tri Setiaji	21 Juli 2022	Kontrak Kerja a/n Bayu Tri Setiaji di unit kerja Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Tahun 2016 dan 2017	Keperluan Kedinasan	3 (tiga) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
68.	Agung Eka putra	27 Juli 2022	Pengajuan Proposal pendanaan Pembangunan kantor desa	Keperluan Usaha	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
69.	Fanny Shafira	28 Juli 2022	Permintaan info alamat email atau kontak Sekretaris Direktur Sumber Daya Air	Keperluan Kedinasan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
70.	Ade Handayani	1 Agustus 2022	Data kontak (email/hp/telpon) Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
71.	Ade Handayani	9 Agustus 2022	Data kontak Nomor WA Bappeda Provinsi Se-Indonesia	Keperluan Penyusunan Kebijakan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
72.	Hadiyan Mukholisin	11 Agustus 2022	Daftar Prioritas Proyek SBSN Tahun 2016-2021	Penyusunan Tugas Akhir	14 (empat belas) hari oleh Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan
73.	Fahmi Prayoga	12 Agustus 2022	Informasi pembagian 17 Tujuan dan 289 Indikator TPB yang ada di Indonesia	Penyusunan Kajian	5 (lima) hari oleh Seknas SDGs
74.	Rizki Jumadi Akbar	16 Agustus 2022	reset pasword akun monev bappenas	Keperluan Kedinasan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
75.	Funny Indri	26 Agustus 2022	Informasi Magang	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
76.	Taofik Rofi Nugraha	3 September 2022	Data APBN 2022, LRA APBN 2021-2022, DPA dan RKA APBN 2021 dan 2022,	Penyusunan Kajian	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
77.	Bayu Tri Setiaji	12 September 2022	SK Pengangkatan dan/atau Pemberhentian yang dikeluarkan Pejabat Berwenang tentang Pegawai Kontrak/Pegawai Honorer/Pegawai Pemerintah Non PNS a/n	Keperluan Kedinasan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan

			Bayu Tri Setiaji Tahun 2016 dan 2017		
78.	Lina Afriyana	12 September 2022	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan Gini Rasio kabupaten/kota dan provinsi di Provinsi NTB Tahun 2016-2021	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
79.	Muhammad Hilmi Azkia	13 September 2022	Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 1990-1994	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
80.	Gyakuni Firsty Niko	28 September 2022	Indeks Pembangunan Masyarakat, Indeks Demokrasi Indonesia, Angka kelahiran Total, Angka Kematian Ibu, Indeks Capaian revolusi mental, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Median Usia kawin Pertama Perempuan	Penyusunan Tesis	3 (tiga) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
81.	Aini Nurul Safitri	7 Oktober 2022	Informasi Lowongan Pekerjaan	Lamaran Pekerjaan	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
82.	Devia Cahyani Sukarno	17 Oktober 2022	Data Geofisika pada bidang airtanah atau lingkungan	Penyusunan Tugas Akhir	3 (tiga) hari oleh Direktorat Pengairan dan Irigasi
83.	Widya Nissa Wildani	18 Oktober 2022	Mekanisme Penelitian di Kementerian PPN/Bappenas	Penyusunan Tugas Akhir	1 (satu) hari oleh Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
84.	Agnes Ginting	18 Oktober 2022	Matriks Lampiran 3 RPJMN 2020-2024 dan Data Realisasi Lampiran 3 RPJMN Periode 2020-2022	Keperluan Kedinasan	5 (lima) hari oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral
85.	Yusril Abubekar Ndori	27 Oktober 2022	Data kondisi geografis dan informasi tentang sektor pembangunan daerah Nusa Tenggar Timur	Penyusunan Kajian	4 (empat) hari oleh Direktorat Regional 3
86.	Sindy Mawaddah	3 November 2022	Perubahan Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) Tahun 2022 untuk Kementrian Pertahanan	Penyusunan Kajian	10 (sepuluh) hari oleh Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan
87.	Ronny Eka Putra	9 November 2022	Data Tutupan Lahan Pulau Jawa tahun 2000-2021 dalam format .shp dan Data Prediksi Tutupan Lahan Pulau Jawa tahun 2100 dalam format .shp	Penyusunan Tugas Akhir	5 (lima) hari oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
88.	Avilia Asfida Suprayitno	30 November 2022	Status KPBU dan RAB Proyek Rumah Susun Bina Harapan Cisaranten Bandung	Penyusunan Tugas Akhir	2 (dua) hari oleh Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
89.	Muhammad Rusli	9 Desember 2022	Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di sumatera Barat	Keperluan Kedinasan	15 (lima belas) hari oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
90.	Albi Kusuma	21 Desember 2022	Mekanisme Permohonan Dana Hibah Bilateral	Keperluan Kedinasan	7 (tujuh) hari oleh Direktorat Pendanaan Bilateral

2.2 PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KOORDINASI SEKRETARIAT PPID DAN PIC PPID

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mencari inspirasi inovasi dalam pelayanan informasi, Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan audiensi ke PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21 Juli 2022. Dalam audiensi tersebut, Sekretariat PPID diterima oleh Ibu Nelly Yuniarti, Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tema yang diusung dalam audienasi adalah (1) Inovasi layanan informasi yang diinisiasi Pemprov Nusa Tenggara Barat dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pemeringkatan Komisi Informasi Pusat. Dan (2) Praktik baik di bidang informasi publik dan kehumasan dalam penyelenggaraan acara internasional MotoGP 2022.

Sebagai upaya koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan koordinasi para PIC PPID di Kementerian PPN/Bappenas, PPID Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan berbagai agenda. Yang pertama adalah Sosialiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Simulasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada 23 Juni 2022 di Hotel Aryaduta Jakarta. Dalam acara tersebut, kami mengundang Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail dan Tenaga Ahli KIP untuk kembali mengingatkan para PIC PPID akan pentingnya keterbukaan informasi, dan memberikan pemahaman dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan, khususnya penyusunan DIP dan DIK.

Pada 29-30 Agustus 2022, PPID Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran DIP dan DIK Tahun 2022 Kementerian PPN/Bappenas di Harris Hotel Summarecon Bekasi sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam rapat ini, PPID Kementerian PPN/Bappenas mengundang Tenaga Ahli KIP untuk memberikan masukan agar DIP dan DIK yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 KUNJUNGAN TAMU

Kegiatan meliputi fasilitasi kunjungan tamu, baik tamu negara, tamu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun akademisi. Dari Januari hingga Desember 2022, tercatat Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan telah memfasilitasi penerimaan kunjungan sebanyak 159 kali, dengan rincian: (1) Tamu Negara sebanyak 4 kali kunjungan; (2) Tamu Daerah sebanyak 150 kali kunjungan; (3) Tamu Akademisi sebanyak 3 kali kunjungan; dan Antar Lembaga 2 kali kunjungan.

Grafik 2.6. Rekapitulasi Kunjungan Tamu selama Tahun 2022

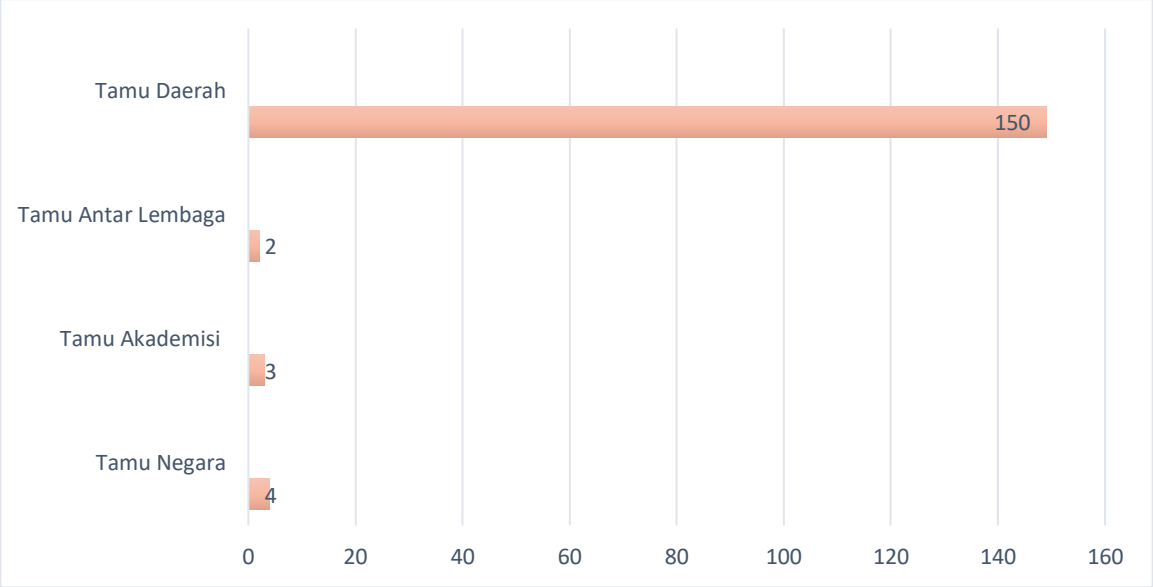

Grafik 2.7. Kunjungan Tamu berdasarkan Jumlah per Bulan Tahun 2022

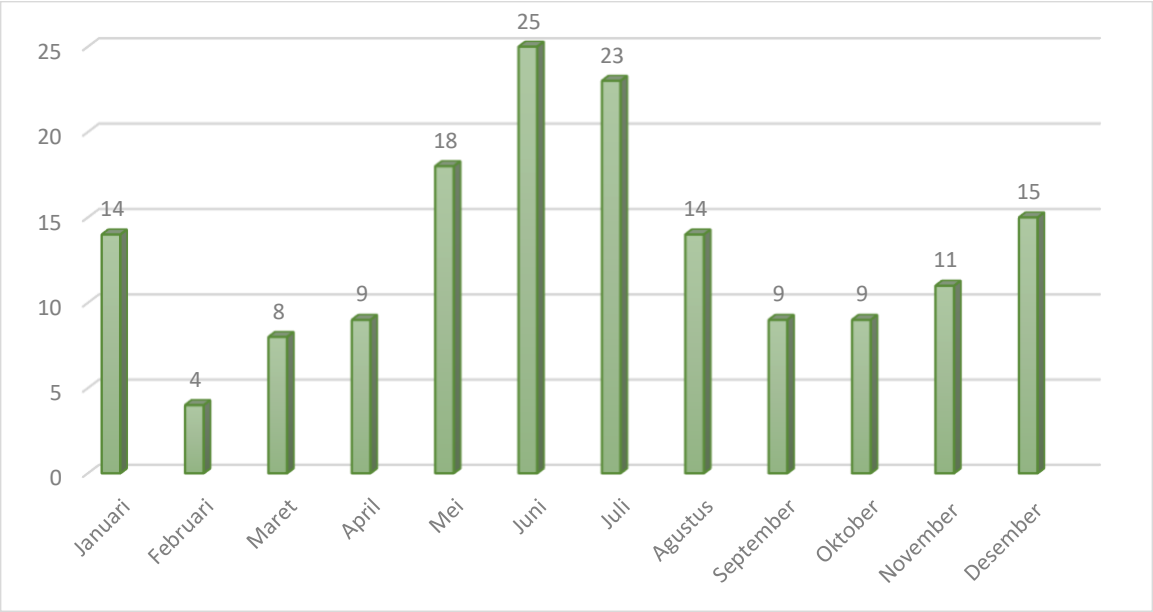

Grafik 2.8. Kunjungan Tamu DPRD berdasarkan UKE II Penerima Tahun 2022

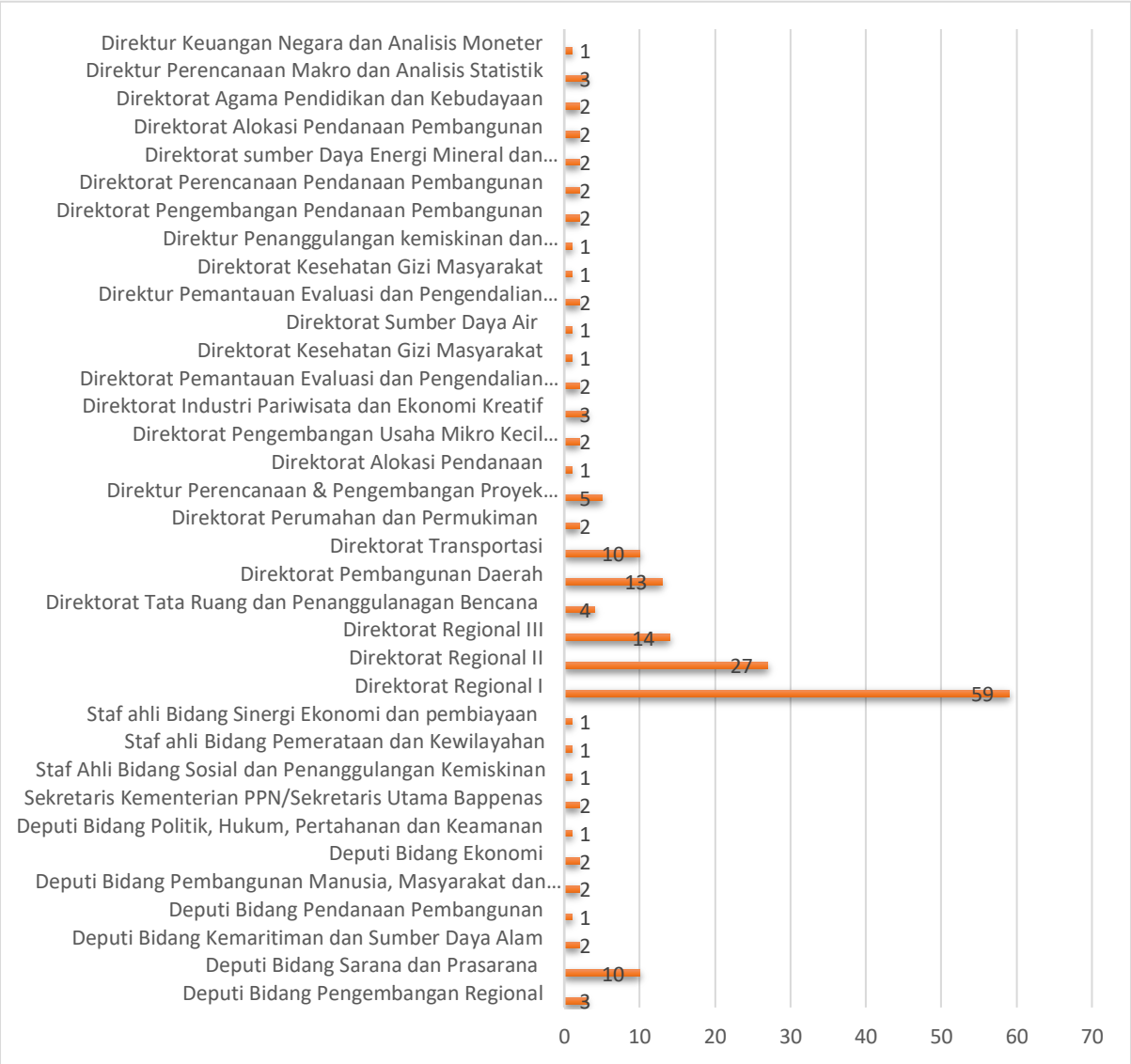

Tabel 2.3. Kunjungan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Delegasi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Jumat, 7 Januari 2022, 10.00	RPJMD Tahun 2021-2026 tentang kesejahteraan Rakyat	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional II
2	Bupati Rejang Lebong	Kamis, 13 Januari 2022, 09.00	Tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD sera tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Ruang Rapat Maluku	Direktorat Regional I

3	Bupati Halmahera Barat	Kamis, 13 Januari 2022, 13.00	Usulan Proyek Infrastruktur Kawasan Strategis di Kabupaten Halmahera Barat	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Regional III
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Senin,17 Januari 2022, 09.00	Pembahasan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 3	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
5	DPRD Provinsi Jawa Barat	Selasa, 18 Januari 2022, 14.00	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2022-2024	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Tata Ruang dan Penanggulanagan Bencana
6	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Rabu, 19 Januari 2022, 13.30	Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan	Ruang Rapat Sulawesi	Direktur Regional II, Direktorat Transportasi
7	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Kamis, 20 Januari 2022, 09.00	Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022, pelaksanaan G20	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I, Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
8	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Jumat, 21 Januari 2022, 13.30	Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional II
9	Bupati Kaur	Jumat, 21 Januari 2022, 14.00	Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran Tahun 2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Pembangunan Daerah, Direktrorat Regional I
10	Walikota Sungai Penuh	Senin, 24 Januari 2022, 10.00	Pembangunan Kota Sungai Penuh yang bersumber dari APBN TA 2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I
11	Gubernur Sulawesi Tengah	Selasa, 25 Januari 2022, 13.00	Rencana Kerja Pemerintah	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional II
12	DPRD Kabupaten Sanggau	Rabu, 26 Januari 2022, 13.30	Program Pembangunan Nasional di Kabupaten Sanggau yang bersumber dari Dana APBN TA 2022	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional II, Direktorat Alokasi Pendanaan
13	Bupati Merangin	Rabu, 26 Januari 2022, 08.30	Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran Tahun 2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I, Direktort Pangan Pertanian, Direktorat Sumberdaya Energi dan Mineral dan Pertambangan
14	Pemerintah Kota Palembang	Jumat, 28 Januari 2022, 09.00	Program strategis nasional yang dilaksanakan pada tahun 2022-2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional I, Direktorat Pembangunan Daerah
15	Bupati Mappi	Senin, 7 Februari 2022, 13.00	Percepatan Pembangunan Kabupaten Mappi	Ruang Rapat Kalimantan	Direktorat Regional III

16	DPRD Provinsi Papua	Senin, 7 Februari 2022, 10.00	Percepatan Pembangunan Provinsi Papua	Ruang Rapat Sumbawa	Staf ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
17	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	Kamis, 10 Februari 2022, 15.00	Program DAK Tahun 2023	Zoom Meeting	Direktorat Regional III
18	Pemerintah Kabuoaten Barito Selatan	Rabu, 16 Februari 2022, 13.30	Penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional	Zoom Meeting	Pusbindiklatren
19	Pemerintah Kota Mojokerto	Rabu, 16 Maret 2022, 13.00	Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Siduarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru dan Pengembangan Wisata Perahu Majapahit	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I dan Direktorat Pembangunan Daerah
20	Pemerintah Kabupaten Jayapura	Rabu, 9 Maret 2022, 13.00	tentang pembangunan sarana dan prasarana Gedung Layanan dan Depot Arsip	Ruang Rapat Sumbawa	Staf ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
21	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Kamis, 17 Maret 2022, 10.00	Rencana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara dan Infrastruktur Penunjang bagi Daerah Penyangga Ibu Kota	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Perumahan dan Permukiman
22	Pemerintah Kota Kendari	Kamis, 24 Maret 2022, 10.00	Rencana Pemerintah Daerah	Kamis, 24 Maret 2022, 10.00	Direktorat Regional II
23	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Selasa, 29 Maret 2022, 09.00	Pengelolaan Terpadu UMKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	Selasa, 29 Maret 2022, 09.00	Direktorat Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
24	DPRD Provinsi Sumatera Utara	Selasa, 29 Maret 2022, 09.00	Percepatan Pembangunan KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung	Selasa, 29 Maret 2022, 09.00	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Direktorat Transportasi dan Direktorat Regional I
25	Pemerintah Kabupaten Jepara	Selasa, 5 April 2022, 13.00	Usulan Kegiatan Prioritas dalam Perencanaan Nasional	Selasa, 5 April 2022, 13.00	Direktorat Regional I
26	Bupati Wonosono	Selasa, 5 April 2022, 11.00	Program strategis nasional	Selasa, 5 April 2022, 11.00	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
27	DPRD Kota Pangkal Pinang	Rabu, 6 April 2022, 09.30	Mekanisme Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam SIPD	Rabu, 6 April 2022, 09.30	Direktorat Regional I
28	DPRD Kabupaten Garut	Rabu, 13 April 2022, 10.00	Singkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah daN Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rabu, 13 April 2022, 10.00	Direktorat Regional I dan Direktorat PEPPD

29	DPRD Provinsi Jambi	Kamis, 14 April 2022, 10.00	Laporat Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jambi TA. 2021	Kamis, 14 April 2022, 10.00	Direktorat Regional I dan Direktorat PEPPD
30	Bupati Sindereng Rappang	Kamis, 14 April 2022, 15.30	DAK	Kamis, 14 April 2022, 15.30	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Direktorat Kesehatan Gizi Masyarakat
31	DPRD Provinsi DIY	Senin, 18 April 2022, 12.30	Rancangan Peraturan Daerah DIY mengenai: Ekonomi Hijau	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber daya alam
32	Bupati Solok	Rabu, 20 April 2022, 10.00	Isu Strategis Pembangunan di Kota Solok	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I
33	DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Kamis, 12 Mei 2022, 10.00	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Tahun 2022-2025	Ruang Rapat Sumatera	Deputi Ekonomi, Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Regional II
34	Sekertaris Daerah Cirebon	Kamis, 19 Mei 2022, 14.00	Kebijakan Pendanaan Pembangunan	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I
35	Bupati Lombok Tengah	Kamis, 19 Mei 2022, 13.00	Singkronisasi program perencanaan pengembangan Daerah sebagai penyangga KEK Mandalika	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional II, Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi kreatif
36	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumat, 20 Mei 2022, 09.30	Jembatan Penghubung antara Bangka-Sumatera	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Transportasi
37	DPRD Provinsi Jambi	Jumat, 20 Mei 2022, 09.00	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ruang Rapat Papua	Direktorat Regional I
38	Tim Kerja Pemekaran Kabupaten Bao Raya	Jumat, 20 Mei 2022, 14.00	Pemekaran DOB Kabupaten Bao Raya	Ruang Rapat Papua	Direktorat Regional III
39	Pemerintah Kota Mojokerto	Senin, 23 Mei 2022, 13.00	Grand Design Penataan Kota	Ruang Rapat Sulawesi	Direktprat Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana
40	DPRD Kabupaten Enrengkang	Senin, 23 Mei 2022, 11.30	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Msyarakat	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
41	Pemerintah Kota Ternate	Selasa, 24 Mei 2022, 14.00	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional III
42	Bupati Sambas	Selasa, 24 Mei 2022, 10.00	Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran Tahun 2023	Ruang Rapat SS 1-2	Plt. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional; Direktorat Regional II
43	Bupati Pangkajene dan Kepulauan	Selasa, 24 Mei 2022, 16.00	Revitalisasi Drainase Wilayah perkotaan	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Sarana dan Prasaran dan Direktorat Pengairan dan Irigasi
44	DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Selasa, 24 Mei 2022, 14.00	Bantu APBN Tahun 2023 untuk Pembangunan	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Sarana dan Prasaran dan Direktorat Pengairan dan Irigasi

			Strategis di Kab Pangkep		
45	Bupati Bandung	Selasa, 24 Mei 2022,09.00	Percepatan Pembangunan	Ruang Rapat Sumbawa	Direktorat Pendanaan Pembangunan
46	DPRD Kepualauan Riau	Selasa, 24 Mei 2022,09.30	Proses Pinjaman Daerah kepada PT. SMI dalam rangka membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis	Ruang Rapat lantai 17	Plt. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan
47	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Rabu, 25 Mei 2022,10.00	Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.	Ruang Rapat Papua	Direktorat Regional I ; Direktorat Transportasi
48	Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumat, 27 Mei 2022,09.00	Pemantauan Proyek Prioritas strategis major project Provinsi Bangka Belitung Tahun 2022	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I
49	Walikota Tual	Selasa, 31 Mei 2022, 14.00	Prioritas Pariwisata dan Transportasi antar pulau dan antar Perdesaan	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Transportasi ; Direktorat Regional III
50	Bupati Pidie Jaya	Selasa, 31 Mei 2022, 14.30	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I dan Transportasi
51	Gubernur Bengkulu	Jumat, 3 Juni 2022, 13.30	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 3	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembangunan Daerah
52	Bupati Panukal Abab Lematang Ilir	Rabu, 8 Juni 2022, 16.00	Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022	Ruang Rapat Sumatera	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
53	Bupati Solok	Kamis, 9 Juni 2022, 09.00	Penyelarasan agenda pembangunan Nasional dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok	Ruang Rapat SS 3	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
54	Bupati Solok	Kamis, 9 Juni 2022, 13.00	Penyelarasan agenda pembangunan Nasional dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
55	Walikota Sawah Lunto	Kamis, 9 Juni 2022, 13.00	Pengendalian Banjir Batang Lunto	Ruang Rapat SS 1-2	Direktorat Sumber Daya Air
56	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Jumat, 10 Juni 2022, 09.30	Dana Alokasi Khusus SMA	Ruang Rapat SS 1-2	Direktur Regional II; Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaann
57	Bupati Bone Bolango	Senin, 13 Juni 2022, 15.00		Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional II
58	Pemerintah Kota Nusa Tenggara Timur	Selasa, 14 Juni 2022, 14.30		Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional III
59	Bupati Serdang Bedagai	Selasa, 14 Juni 2022, 14.00	Penyelarasan antara Pusat dan Daerah	Ruang Rapat Kalimantan	Regional I, Direktorat Perumahan dan Permukiman

60	Bupati Ngawi	Selasa, 14 Juni 2022, 10.00	Dana Alokasi Khusus dan Penganggaran Infrastruktur Prioritas	Ruang Rapat Sumbawa	Direktorat Regional I
61	Bupati Bolang Mongondow Selatan	Rabu, 15 Juni 2022, 10.00	Dana Alokasi Fisik	Ruang Rapat Sumatera	Regional III
62	DPRD Kota Malang	Jumat, 17 Juni 2022, 09.00	Program Dana Hibah	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
63	Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara	Kamis, 16 Juni 2022, 14.00	Pembangunan Infrastruktur Penghubung	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Transportasi
64	Pemerintah Kabupaten Sindereng Rappang	Jumat, 17 Juni 2022, 10.30	Dana Alokasi Khusus T.A 2023 bidang Irigasi	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2	Direktorat Sumber Daya Air
65	DPRD Kabupaten Berau	Jumat, 17 Juni 2022, 14.30	Penyusunan Jadwal Pembahasan APBD dan Singkronisasi Pembahasan APBN	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional II
66	Bupati Siak	Senin, 27 Juni 2022, 10.00	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Ruang Rapat Kalimantan	Direktorat Regional I
67	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	Selasa, 21 Juni 2022, 15.00	Kebijakan Program strategi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur Pada tahun 2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional III
68	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Rabu, 22 Juni 2022, 10.00	Rencana Pembangunan Akses Jalan Penghubung ke jembatan Pulau Balang Sisi Balikpapan	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Transportasi dan Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan
69	Bupati mesuji	Rabu, 22 Juni 2022, 09.00	Harmonisasi dan Singkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah	Ruang Rapat SS 1-2	Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
70	Bupati Gorontalo	Senin, 27 Juni 2022, 10.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional II
71	Bupati Simeuleu	Senin, 27 Juni 2022, 14.00	Pendanaan Pembangunan Sumber Pinjaman atau Hibah Luar Negeri	Ruang Rapat Sumatera	regional I dan Direktorat Perencanaan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
72	Bupati Mesuji sesi I	Rabu, 29 Juni 2022, 13.00	menjalin sinergisitas, harmonisasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan anatara pemeritah pusat dan daerah	Ruang Rapat Sekretariat Sesmen	Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
73	Bupati Mesuji sesi II	Rabu, 29 Juni 2022, 14.00	menjalin sinergisitas, harmonisasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan anatara pemeritah pusat dan daerah	Ruang Rapat SS 1-2	Direktorat Regional I

74	Pemerintah Kota Balikpapan	Jumat, 1 Juli 2022, 13.00	Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai beranda IKN	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Direktur Regional II, Direktur Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
75	DPRD Provinsi Sumatera Utara	Jumat, 1 Juli 2022, 14.00	Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional I
76	Pemerintah Kota Ketapang	Senin, 4 Juli 2022, 09.00	Dana Alokasi Fisik Tahun 2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional II
77	Walikota Priaman	Senin, 4 Juli 2022, 14.00	Membahas isu-isu strategis perencanaan pembangunan di Kota Pariaman	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional II
78	Bupati Tabrauw	Senin, 4 Juli 2022, 14.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional III
79	Bupati Poso	Senin, 4 Juli 2022, 13.30	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sulawesi	Direktur Regional II
80	Bupati Pesawaran	Rabu, 6 Juli 2022, 10.00	Pinjaman Dearah	Ruang Rapat Sulawesi	Direktur Regional I
81	Pemerintah Kabupaten Pemalang	Selasa, 12 Juli 2022, 09.00	Menyusun Analisis dan Profil Pembangunan Daerah yang menggunakan pendekatan holistik, tematik dan integratif	Ruang Rapat Sulawesi	Direktur Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana
82	Bupati Parigi Moutong	Rabu, 13 Juli 2022, 10.00	Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Ruang Rapat Kalimantan	Direktur Regional II
83	Bupati Halmahera Barat	Rabu, 13 Juli 2022, 11..00	Peningkatan Failitas pendidikanm kesehatan dan bantuan perumahan untuk mendukung pusat kegiatan nasional	Ruang Rapat Sekretariat Sesmen	sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
84	DPRD Provinsi Jambi	Rabu, 13 Juli 2022, 09.00	Pembangunan Jalan Tol	Ruang Rapat SS 1-2	Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
85	Bupati Pasaman	Selasa, 19 Juli 2022, 10.00	Prpgram Prioritas Daerah	Ruang Rapat Flores	Direktur Regional I
86	Bupati Natuna	Selasa, 19 Juli 2022, 14.00	Program-program pembangunan di Kabupaten Natuna	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional I
87	Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	Selasa, 19 Juli 2022, 09.00	Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir	Ruang Rapat Papua	Direktur Regional I
88	Bupati Mappi	Rabu, 20 Juli 2022, 10.00	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional III
89	DPRD Kabupaten Lahat	Kamis, 21 Juli 2022, 09.00	Rancangan KUA & PPAS Kabupaten Lahat	Ruang Rapat Sulawesi	Direktur Regional I

90	Bupati Kabupaten Bantul	Kamis, 21 Juli 2022, 09.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional I
91	DPRD Provinsi Sumatera Utara	Jumat, 22 Juli 2022, 10.00	Pinjaman Luar Negeri Pembangunan Rumah sakit Haji	Ruang Rapat Sumatera	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
92	Pemerintah Kota Blitar sesi I	Senin, 25 Juli 2022, 15.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumbawa	Staf ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan pembiayaan
93	Pemerintah Kota Blitar sesi II	Selasa, 26 Juli 2022, 10.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional I
94	Bupati Tanimbar	Rabu, 27 Juli 2022, 10.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dan Direktorat Pembangunan Daerah
95	Pemerintah Provinsi Lampung	Jumat, 29 Juli 2022, 09.00	Evaluasi Dokumen RPJPD	Ruang Rapat Kalimantan	Direktur Regional I dan Direktorat Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana
96	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perikanan dan Kelautan	Jumat, 29 Juli 2022, 16.00	Lokasi Prioritas Kawasan Sentra Produksi Perikanan di Kalimantan Tengah	Ruang Rapat Flores	Direktur Regional II
97	DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Kamis, 4 Agustus 2022, 14.00	Usulan Perencanaan PPU sebagai Penyangga IKN	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional II
98	Bupati Ngada	Kamis, 4 Agustus 2022, 10.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktiorat Regional III
99	DPRD Provinsi Sumatera Utara	Jumat, 5 Agustus 2022, 09.30	Penganggaran PON XXI 2024 di Sumatera Utara dan Aceh	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan; Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga
100	DPRD Kabupaten Pacitan	Jumat, 5 Agustus 2022, 09.00	Dana Alokasi Khusus Tahun 2023	Ruang Rapat Sumatera	Direktoarat Regional I
101	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	Selasa, 9 Agustus 2022, 14.00	Satu Data Indonesia dan Permohonan Rekomendasi Pertimbangan terkait pinjaman Daerah	Ruang Rapat Sumbawa	Tim Satu Data Indonesia, Direktorat Pembangunan Daerah
102	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Rabu, 10 Agustus 2022, 14.00	Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional II
103	Pemerintah Kota Palu	Jumat, 12 Agustus 2022, 09.00	Penanganan Reabilitas dan Rekontruksi di Kota Palu Pasca Bencana dan Proses Kerjasama Luar Negeri JOCA (Japan Overses Cooperative Assosiation)	Ballroom lantai 20	Direktorat Tata Ruang dan Penanggulanagan Bencana
104	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Senin, 16 Agustus 2022, 16.30	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumbawa	Deputi Bidang Pengembangan Regional

105	DPRD Kabupaten Kota Baru	Kamis,25 Agustus 2022, 10.00	Perencanaan pembangunan kabupaten Kota Baru	Ruang Rapat Sumatera	Direktur Regional I
106	DPRD KotaPekalongan	Kamis,25 Agustus 2022, 09.00	Kebutuhan Prasarana Transportasi	Ruang Rapat Kalimantan	Direktur Regional I, Direktur Transportasi
107	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Senin, 29 Agustus 2022,13.00	Pengusulan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan wilayah strategis di kabupaten trenggalek	Ruang Rapat Kalimantan	Direktorat Transportasi dan Direktorat Regional I
108	Bupati Karang Asem	Selasa, 30 Agustus 2022, 09.00	Percepatan Penanggulangan kemiskinan menuju pemulihan Daerah	Ruang Rapat Sumatera	Direktprat Regional I
109	Bupati Temanggung	Rabu, 31 Agustus 2022, 13.00	Usulan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ruang Rapat Sumatera	Direktprat Regional I
110	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Selasa, 6 September 2022, 09.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sumatera	Direktprat Regional I
111	Bupati Tanah Bumbu	Kamis, 8 September 2022, 14.00	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional II
112	Bappeda Kalimantan	Kamis, 8 September 2022, 16.00	Kajian Ibu Kota Negara	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional II
113	DPRD Kabupaten Pacitan	Kamis, 15 September 2022, 10.00		Ruang Rapat Sumatera	Direktprat Regional I
114	DPRD Kabupaten Bulukumba	Jumat, 16 September 2022, 10.00	Perencanaan Pembangunan Daerah	Ruang Rapat Sumatera	Direktprat Regional II
115	DPRD Kabupaten Kebumen	Selasa, 20 September 2022, 09.00	DAK geopark karang sambung	Ruang Rapat Djunaedi hadisumarto 4	Direktorat sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan
116	Bappeda Kabupaten Muaro Jambi	Rabu, 28 September 2022, 13.00	DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata	Ruang Rapat Sulawesi	Direktprat Regional I
117	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Jumat,7 Oktober 2022, 14.00	Pinjaman Dearah	Ruang Rapat Sumatera	Dirktorat Regional I, Direktorat Pembangunan Daerah, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
118	Pemerintah Kabupaten Mimika	Kamis, 13 Oktober 2022, 10.00	Pengajuan Dana DAK	Ruang Rapat Sumatera	Direktiorat Regional III, Direktorat Transportasi
119	Bupati Padang Pariaman	Jumat, 14 Oktober 2022, 14.00	Usulan Jalan dan jembatan dalam Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	Ruang Rapat Djunaedi hadisumarto 4	Deputi Bidang Pengembangan Regional
120	Bupati Belitung Timur	Selasa, 18 Oktober 2022, 14.00	Pengembangan Pelabuha di Kabupaten Belitung Timur	Ruang Rapat SS 1-2	Direktorat Regional I dan Direktorat Transportasi

121	DPRD Kabupaten Kotabaru	Rabu, 19 Oktober 2022, 10.00	Mekanisme Proses Tahapan Pencairan Dana Stimulus Infrastruktur Kan/Kota Tahun 2023	Ruang rapat sulawesi	Direktur Regional II
122	DPRD Kabupaten Kebumen	Rabu, 26 oktober 2022, 09.00	Regulasi Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 khususnya Kabupaten Kebumen	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I
123	Bupati Nias	Senin, 24 Oktober 2022, 10.00	Perecepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dalam rangka mendukung pengembangan wilayah provinsi kabupaten/kota	Ruang Rapat Direktur Transportasi	Direktur Transportasi
124	Bupati Sigi	Kamis, 27 Oktober 2022, 10.00	Menindaklanjuti Program Implementasi Perluasan Kemitraan Strategi antara Usaha Mikro dan Kecil (UKM) dengan Usaha Menengah dan Besar	Ruang Rapat Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
125	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumat, 28 Oktober 2022, 14.00	Recana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah berbasis Pengembangan Kluster perkotaan, Kluster Agropolitan, Kawasan Pangan dan Kawasan industri	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Regional II
126	Bupati Pasaman	Rabu, 2 November 2022, 14.00	Menyusun Dokumen Rencana Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana"	Ruang Rapat Fllores	Direktoarat Regional I
127	Bupati gorontalo Utara	Rabu, 2 November 2022, 13.00	Pemaparan Master Plan Kwandang Water Front City	Ruang Rapat SS 3	Direktorat Regional II
128	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kamis, 3 November 2022, 14.00	Proyek strategis di bidang ekonomi dan Infrastruktur	Ruang Rapat Kalimantan	Direktoarat Regional I
129	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Jumat, 4 November 2022, 10.00	DAK	Ruang Rapat Sumatera	Direktoarat Regional I
130	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Rabu, 16 November 2022,10.00	Pembangunan FS Jembatan Rupat-Dumai	Ruang Rapat SS 1-2	DirektoaraT Transportasi
131	Bupati Merauke	Jumat,18 November 2022, 09.00	Pembnagunan Infrastruktur	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Regional III
132	Walikota Bandar Lampung	Kamis, 24 November 2022, 13.30	DAK	Ruang Rapat Sulawesi	Direktoarat Regional I, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

133	Pemerintah Kota Palu	Kamis 23 November 2022, 09.00	Krisna DAK	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Pembangunan Daerh
134	DPRD Kabupaten Pacitan	Kamis, 24 November 2022, 13.30	Dana Transfer Umum	Ruang Rapat Sumatera	Direktoarat Regional I
135	Pemerintah Kabupaten Pidie	Jumat, 25 November 2022, 10.00	DAK	Ruang Rapat Sumatera	Direktoarat Regional I, Direktorat Pembangunan daerah
136	Pemerintah Kabupaten Ternate	Rabu, 30 November 2022, 09.00	DAK	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional III, Direktorat Pembangunan Daerah, Direktorat Agama Pendidikan dan Kebudayaan
137	Pemerintah Kota Batubara	Kamis, 1 Desember 2022, 10.00	Kawasan Strategis nasional	Ruang Rapat Kalimantan	Direktorat Regional I
138	DPRD Kabupaten Langkat	Senin, 5 Desember 2022, 10.00	Program Kementerian Bappemas untuk daerah tahun 2023	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional II
139	Pemerintah Kabupaten Bone	Rabu, 7 Desember 2022, 10.00	Penyelenggaraan satu data indonesia, pengembangan wilayah dan kawasan	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I
140	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumat, 9 Desember 2022, 13.30	Koordinasi pelaporan pelaksanaan P3TB	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
141	Pemerintah Kabupaten Bungo	Jumat, 9 Desember 2022, 09.00	Kawasan Transmigrasi Bathin ulu kabupaten Bungo	Ruang Rapat Kalimantan	Direktorat Regional I
142	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Rabu, 14 Desember 2022, 09.00	Optimalisasi Pelaksanaan Program kepenataan pasar/kemitraan strategis	Ruang Rapat Kalimantan	Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
143	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Kamis, 15 Desember 2022, 13.00	DAK	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I
144	DPRD Kota Yogyakarta	Jumat, 16 Desember 2022, 09.00	DAK	Ruang Rapat Djunaedi hadisumarto 4	Direktorat Perumahan dan Permukiman
145	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Jumat, 16 Desember 2022, 14.00	Kawasan sentra produksi pangan kabupaten musi rawas	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I
146	Bupati Kabupaten Gunung Mas	Senin, 19 Desember 2022, 13.30	DAK Fisik Tahun Anggaran 2024	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional II
147	Bupati Samoang	Selasa, 20 Desember 2022, 15.00	Pembangunan Jalur lalu lintas madura	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I
148	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	Rabu, 21 Desember 2022, 13.00	DAK Fisik Tahun Anggaran 2024	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I
149	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Rabu, 21 Desember 2022, 13.00	Singkroniasasi Kebijakan Dana Alokasi Umum dengan Perencanaan	Ruang Rapat Sulawesi	Direktorat Regional I

			Pembangunan Daerah Tahun 2024		
150	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Rabu, 21 Desember 2022, 13.00	DAK	Ruang Rapat Sumatera	Direktorat Regional I

Tabel 2.4. Kunjungan Tamu Negara Asing Tahun 2022

No	Delegasi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1	Duta Besar Republik Indonesia Abu dhabi	Selasa, 9 Maret 2022, 09.00	Pemindahan Ibu Kota Negara	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2	Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Ekonomi
2	Kedutaan Besar Malaysia Bahagia Perdagangan	Kamis, 31 Maret 2022, 11.00	Pemindahan Ibu Kota Negara	Ruang Rapat Sulawesi	Direktur Pembangunan Daerah
3	Ayeconomic	Rabu, 8 Juni 2022, 08.00	metodologi Inovasi Smart TIO	Ruang rapat Kalimantan	Direktorat Perencanaan makro dan Analisis Statistik
4	GGGI Delegasi Korea Selatan	Rabu, 28 September 2022, 08.30	memastikan ownership dari pemerintah indonesia pada usulan proyek e-mobility di Bali	Ruang Rapat SS 1-2	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5. Kunjungan Tamu Akademisi/Universitas Tahun 2022

No	Delegasi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1	Universitas Padjadjaran	Senin, 20 juni 2022, 13.00	Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Negara	zoom	Direktorat Pembangunan Daerah
2	Universitas Maritim Raja Ali	Selasa, 20 September 2022, 10.00	Mekanisme Musrenbangnas	SS 1-2	Direktorat Reagional I dan Direktorat Regional II
3	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Rabu, 7 Desember 2022, 14.00	Ekonomi Pembangunan	SS 1-2	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter dan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

Tabel 2.6. Kunjungan Tamu Antar Lembaga Tahun 2022

No	Delegasi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1	PT. Dirgantara Indobesia	Kamis,4 Agustus 2022, 13.00	Pemanfaatan peswat N219 dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat indonesia di wilayah yang termasuk katagori tertinggal,terdepan, terluar dan pendalaman (3T&P)	Ruang Rapat SS 3	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
2	Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia	Kamis, 16 Juni 2022, 16.00	Dukungan pemaparan Interational Port, Shipping dan logistic Conference and exhibition (ISPEC)	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

2.4 BADAN KOORDINASI HUMAS (BAKOHUMAS)

Terhitung mulai Januari hingga Desember 2022, Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan telah mengikuti sebanyak 2 Forum pertemuan berkala Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga Pusat. Diharapkan pertemuan tersebut dapat meningkatkan kerja sama unit kehumasan pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang kehumasan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kehumasan. Namun seperti tahun sebelumnya, pada 2022 Kementerian PPN/Bappenas tidak menyelengarakan forum pertemuan Bakohumas.

Tabel 2.7. Pertemuan Bakohumas yang Dihadiri selama Tahun 2022

No.	Instansi	Tanggal	Tema	Tempat
1.	Badan Intelijen Negara (BIN)	Rabu, 23 Maret 2022	Optimalisasi Peran Aktif Bakohumas Dalam Mendukung Pembangunan IKN Guna Pemerataan Pembangunan, Kesejahteraan Dan Pertahanan Negara	Markas Besar Badan Intelijen Negara
2.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Kamis, 20 Oktober 2022	Peran Instansi Pemerintah dalam Menciptakan Informasi Program Pembangunan sebagai Awal Pembentukan Warisan Dokumenter: Program Registrasi Nasional Memori Kolektif Bangsa	Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel

2.5 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Hal ini merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan, di mana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Untuk memperkuat SP4N, Kementerian PANRB mengintegrasikan sistem aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!) yang telah dikelola Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai platform utama SP4N. Sehingga sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dikenal sebagai SP4N-LAPOR!

Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu Kementerian yang terhubung dengan aplikasi LAPOR! Berdasarkan surat dari Kantor Staf Presiden No. B-14/KSP/03/2015 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR!, pada tanggal 23 Maret 2015. Dalam perkembangannya, Pengelolaan LAPOR! kemudian beralih ke Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan melalui Nota Dinas No. 008/B.04.ND/01/2021 pada tanggal 5 Januari 2021. Sejak saat itu, Unit kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi pengelola Admin Instansi LAPOR! di Kementerian PPN/Bappenas.

Sejak Januari hingga Desember 202, Kementerian PPN/Bappenas telah menerima 21 laporan melalui aplikasi LAPOR! dengan tingkat keterselesaian sebesar 100%. Sejumlah 19 laporan yang masuk dan memenuhi kriteria telah ditanggapi oleh unit kerja terkait dan diselesaikan baik oleh sistem maupun pelapor yang bersangkutan. Sedangkan 2 laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan telah diarsipkan karena tidak memenuhi ketentuan laporan yang telah ditetapkan. Berdasarkan klasifikasi laporannya, laporan yang telah ditindaklanjuti didominasi oleh aspirasi sebanyak 6 laporan dan permintaan informasi sebanyak 5 laporan dan pengaduan tidak berkadar pengawasan sebanyak 1 laporan.

Isu yang dilaporkan oleh masyarakat cukup bermacam-macam. Isu yang paling banyak dilaporkan adalah terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), yaitu sebanyak 8 laporan. Isu terbanyak selanjutnya terkait Manajeman Jabatan Fungsional Perencana (3 laporan). Isu lain yang yang dilaporkan meliputi Kontak Sekretariat Satu

Data Indonesia dan Sekretariat SDGs (masing-masing 1 laporan), Fasilitas untuk Ibu Menyusui dan penitipan Anak (1 Laporan), Pelayanan Koperasi Bappenas (1 laporan), dan lain-lain.

Tabel 2.8. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik selama Tahun 2022

No	Nama Pelapor	Tanggal	Judul Laporan	Unit Kerja Yang Berwenang Memberikan Jawaban	Status Laporan
1.	Dedy Subroto	13 Jan 2022	Nama Ibukota Baru	Direktorat Pembangunan Daerah	Ditutup oleh Sistem
2.	Anonim	17 Jan 2022	Tugas Dan Kewenangan Jf Perencana	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Ditutup oleh Sistem
3.	Anonim	20 Jan 2022	Saran Pembangunan Istana Di Kalimantan	Direktorat Pembangunan Daerah	Ditutup oleh Sistem
4.	Anonim	27 Jan 2022	Pengangkatan Ke Jf Perencana Dari Pelaksana	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Ditutup oleh Sistem
5.	Anonim	2 Feb 2022	Penahanan Allowance Pusbindiklatren Bappenas	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Ditutup oleh Sistem
6.	Anonim	16 Feb 2022	Menu Hubungi Kami Pada Portal Satu Data	Sekretariat Satu Data Indonesia	Ditutup oleh Sistem
7.	Anonim	27 Feb 2022	Informasi Kompleks Bappenas Siaga	Biro Umum	Ditutup oleh Sistem
8.	Anonim	1 Mar 2022	Ikn Nusantara	Direktorat Pembangunan Daerah	Ditutup oleh Sistem
9.	Kartika Asih	12 Mar 2022	Opini Perpindahan Asn Ke Ikn	Direktorat Pembangunan Daerah	Ditutup oleh Sistem
10.	Rully Hendryan	13 Apr 2022	Permintaan Informasi Untuk Bisa Mutasi Masuk Ke Instansi Badan Otorita Ikn	Direktorat Pembangunan Daerah	Ditutup oleh Sistem
11.	Anonim	15 Jun 2022	Saran Ibu Kota Baru Indonesia	Direktorat Pembangunan Daerah	Ditutup oleh Sistem
12.	Anonim	26 Jun 2022	Tidak Ada Fasilitas Untuk Ibu Menyusui Dan Penitipan Anak	Biro Umum	Ditutup oleh Sistem

13.	Khoirin Nissa	28 Jun 2022	Pengaduan Pelayanan Koperasi Bappenas	Koperasi Kementerian PPN/Bappenas	Ditutup oleh Pelapor
14.	Anonim	11 Jul 2022	Data Spesifik Pembangunan Manusia Indonesia Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045	Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK; Direktorat Ketenagakerjaan	Ditutup oleh Sistem
15.	Anonim	25 Jul 2022	Rencana Aksi Perubahan Iklim	Direktorat Lingkungan Hidup	Ditutup oleh Sistem
16.	Anonim	12 Aug 2022	Slow Respon Sekretariat Sdgs Bappenas	Sekretariat Nasional SDGs	Ditutup oleh Sistem
17.	Anonim	30 Aug 2022	Saran Ibu Kota Baru Ikn	Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan	Ditutup oleh Sistem
18.	Anonim	19 Sep 2022	Tindak Lanjut Remedial Ujikom Perencana	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Ditutup oleh Sistem
19.	Anonim	23 Dec 2022	Saran Buat Ibu Kota Baru Indonesia	Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan	

BAB III
PEMBAHASAN

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai capaian dalam hal keterbukaan informasi yang mendapat predikat informatif, pelayanan kunjungan tamu yang optimal, hingga pengaduan pelayanan publik dengan tingkat keterselesaian yang maksimal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat.

3.1 FAKTOR PENDUKUNG

Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang baik berdampak positif terhadap kelancaran seluruh kegiatan.
2. Staf pelaksana yang kompeten dan saling mendukung serta berkeinginan kuat untuk belajar, menyokong satu sama lain apabila ada kegiatan yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan.
3. Adanya *Person in Charge* (PIC) PPID dari UKE I dan II yang menguasai informasi sektoral, semakin mempercepat pelayanan informasi publik.
4. Hubungan baik dengan *stakeholders* utamanya Komisi Informasi Pusat, Humas Kementerian/Lembaga, dan Bakohumas membuat koordinasi menjadi lebih efektif.
5. Tersedia dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mumpuni sehingga dapat membantu pelayanan informasi dan kunjungan tamu secara daring/*online*, terutama di masa pandemi Covid-19.
6. Tersedia saluran komunikasi untuk pelayanan permohonan informasi dan kunjungan tamu sehinga memudahkan komunikasi dengan penerima layanan dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait.
7. Keluaran kegiatan diarsipkan dengan baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT

Berikut adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pada beberapa unit kerja terhadap keterbukaan informasi publik yang menjadikan unit kerja terkesan sulit untuk menyampaiakn informasi yang dimohonkan. Kurangnya kesadaran tersebut juga menjadikan respons unit kerja terhadap permohonan informasi kurang cepat sehingga waktu penanganan menjadi lebih lama.
2. Informasi terkait kunjungan tamu yang disampaikan secara mendadak sehingga menghambat pelayanan secara optimal, utamanya terkait ketersediaan narasumber.
3. Adanya pandemi Covid-19 dan penerapan Bekerja Dari Rumah *(Work From Home)* selama beberapa waktu pada Tahun 2022 yang menghambat pelaksanaan kunjungan tamu dan pelayanan informasi secara fisik.
4. Belum adanya dasar hukum dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik sehingga menyulitkan pengelola dalam melakukan pengelolaan pengaduan secara optimal.

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2022 ini dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami berbagai peningkatan. Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan berhasil memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Kementerian PPN/Bappenas yang mendapat predikat Badan Publik Informatif dan peringkat kedua kementerian dari Komisi Informasi Pusat. Selain itu, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga menunjukkan pelayanan yang diberikan berada dalam kategori baik. Hingga akhir periode, seluruh permohonan informasi, kunjungan tamu, dan laporan yang masuk telah terselesaikan dengan baik.

Tuntutan pelaksanaan *good governance* di era keterbukaan informasi yang dengan mudah dan cepat mendapat layanan informasi yang akurat memacu Kementerian PPN/Bappenas untuk selalu dapat menjalankan tupoksi dengan baik dan selalu berinovasi untuk mengembangkan layanan informasi. Tahun 2022, PPID Kementerian PPN/Bappenas memutakhirkan tampilan dan konten di website *ppid.bappenas.go.id* dan membangun Aplikasi Mobile PPID berbasis Android, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan informasi dari Kementerian PPN/Bappenas di mana saja dan kapan saja.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas Kementerian PPN/Bappenas di mata masyarakat luas. Beberapa perbaikan ke depan yang diharapkan, antara lain:

1. Kembali merekrut staf PPID dengan tugas yang berfokus pada pelayann informasi, penyusunan dasar hukum pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) dan administrasi.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di internal Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan serta unit kerja lain di Kementerian PPN/Bappenas

sehingga pelayanan informasi publik dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien.

3. Melakukan penambahan fasilitas penerimaan permohonan informasi terutama bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat memberikan pelayana yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dan mekanisme pelayanan informasi publik kepada seluruh PIC PPID untuk meningkatkan kesadaran dan respons dari PIC PPID dalam menangani permohonan informasi.
5. Menyusun SOP yang jelas dan terstruktur terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
6. Melakukan studi banding ke beberapa Badan Publik yang memiliki predikat informatif untuk mendapatkan *best practices* sebagai upaya peningkatan inovasi dan pelayanan informasi publik.

LAPORAN KOORDINASI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

Kementerian PPN/ Bappenas

BIRO HUMAS, KEARSIPAN, & TATA USAHA PIMPINAN

www.bappenas.go.id humas@bappenas.go.id Kementerian PPN/Bappenas @bappenasRI